

Penguatan Literasi Digital Politik Perempuan melalui Pelatihan Pencegahan Hoaks untuk Mendukung Demokrasi Partisipatif di Desa Sukajaya Kabupaten Ciamis

Wiwi Widiastuti¹, Fitriyani Yuliatwati², Taufik Nurohman³, Rahmi Nur Shofa⁴, Nisa Khoerunisa⁵, Sasy Tasya Kierana⁶, Nur Rachmi Chayatri⁷, Kukun Abdul Syakur Munawar⁸

Universitas Siliwangi¹⁻⁸



Email Korespondensi: wiwi.widiastuti@unsil.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 12-07-2026

Disetujui 18-07-2026

Diterbitkan 20-07-2026

Katakunci:

*Liiterasi digital;
perempuan; hoaks;
demokrasi partisipatif;
pengabdian kepada
masyarakat.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai sumber informasi digital, namun pada saat yang sama juga memperbesar risiko penyebaran hoaks, disinformasi, dan manipulasi informasi yang dapat memengaruhi kualitas partisipasi demokrasi. Perempuan sebagai pendidik pertama dalam keluarga dan penggerak kehidupan sosial memiliki posisi strategis dalam membangun budaya literasi digital di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi digital politik perempuan melalui pelatihan pencegahan hoaks guna mendukung demokrasi partisipatif di Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Kegiatan menggunakan pendekatan Participatory Learning and Action (PLA) dengan desain one-group pre-test-post-test. Sebanyak 32 perempuan desa berpartisipasi dalam pelatihan yang dilaksanakan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi identifikasi hoaks, praktik fact-checking, serta refleksi bersama. Data dikumpulkan menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang terdiri atas sepuluh soal pilihan ganda dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas Shapiro-Wilk, paired sample t-test, dan ukuran efek (Cohen's d). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 80,00 pada saat pre-test menjadi 98,12 pada saat post-test. Seluruh indikator literasi digital mengalami peningkatan, terutama kemampuan melakukan verifikasi informasi, mengenali hoaks, serta memahami partisipasi politik perempuan. Hasil paired sample t-test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara skor pre-test dan post-test ($p < 0,001$), sedangkan nilai Cohen's d = 2,15 menunjukkan bahwa pelatihan memberikan efek yang sangat besar terhadap peningkatan literasi digital peserta. Kegiatan ini menghasilkan model Penguatan Literasi Digital Politik Perempuan Berbasis Partisipatif yang menempatkan pelatihan partisipatif sebagai sarana membangun kesadaran kritis, keterampilan verifikasi informasi, perilaku bermedia digital yang bertanggung jawab, serta penguatan partisipasi demokrasi dan ketahanan informasi masyarakat desa.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Widiastuti, W., Yuliawati, F., Nurohman, T. ., Shofa, R. N. ., Khoerunisa, N. ., Kierana, S. T. ., Chayatri, N. R., & Munawar, K. A. S. (2026). Penguatan Literasi Digital Politik Perempuan melalui Pelatihan Pencegahan Hoaks untuk Mendukung Demokrasi Partisipatif di Desa Sukajaya Kabupaten Ciamis. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(4), 2091-2108. <https://doi.org/10.63822/355rx317>

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, memproduksi, dan mendistribusikan informasi. Internet dan media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik baru yang memengaruhi perilaku sosial, ekonomi, bahkan politik masyarakat. Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut membuka peluang yang besar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah. Namun, di sisi lain, kemudahan akses informasi juga diikuti oleh meningkatnya penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta manipulasi informasi yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dan kohesi sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemampuan mengakses teknologi saja tidak lagi memadai, melainkan harus diimbangi dengan kemampuan memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab.

Konsep literasi digital berkembang sebagai respons terhadap perubahan tersebut. Paul Gilster bahwa: *"Digital literacy is the ability to understand and use information in multiple formats from a wide range of sources when it is presented via computers."* Gilster (1997, hal.1) Menurutnya, inti literasi digital bukan terletak pada kemampuan teknis mengoperasikan perangkat digital, melainkan pada kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi kredibilitas informasi, memahami konteks, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan konsep tersebut kemudian diperluas oleh UNESCO (2018, hal. 6) yang menyatakan: *"Digital literacy is the ability to access, manage, understand, integrate, communicate, evaluate and create information safely and appropriately through digital technologies."* UNESCO memandang literasi digital sebagai seperangkat kompetensi yang mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi, menciptakan, serta mengomunikasikan informasi secara etis, aman, dan bertanggung jawab dalam lingkungan digital. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kecakapan teknologi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, politik, dan etika dalam penggunaan media digital.

Pentingnya literasi digital semakin mengemuka ketika ruang digital menjadi arena utama pertukaran informasi politik. Informasi mengenai kebijakan pemerintah, pemilihan umum, pelayanan publik, hingga isu-isu sosial kini banyak beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Sayangnya, ruang digital juga menjadi medium penyebaran hoaks yang dapat memengaruhi persepsi publik, memperkuat polarisasi, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi mendorong masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang keliru. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, kritis, dan resilien terhadap berbagai bentuk manipulasi informasi.

Dalam konteks tersebut, perempuan memiliki posisi yang sangat strategis. Perempuan, khususnya di wilayah pedesaan, tidak hanya berperan sebagai pengguna media digital, tetapi juga sebagai pendidik pertama dalam keluarga, pengelola komunikasi rumah tangga, sekaligus penggerak berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Informasi yang diterima perempuan sering kali diteruskan kepada anggota keluarga maupun lingkungan sekitarnya sehingga kemampuan perempuan dalam memverifikasi informasi akan memberikan efek berantai terhadap kualitas literasi digital masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan

pemikiran Paulo Freire (1970, hal. 35) menyatakan: *"Reading the world always precedes reading the word."* Pandangan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan harus mampu membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap realitas sosial. Dalam konteks kegiatan ini, perempuan desa didorong untuk tidak sekadar menerima informasi dari media sosial, tetapi mampu mengkritisi, memverifikasi, dan memahami dampaknya terhadap kehidupan demokrasi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali hoaks, melakukan verifikasi informasi, serta menggunakan media digital secara lebih bertanggung jawab. Namun demikian, sebagian besar program literasi digital masih berfokus pada pelajar, mahasiswa, atau masyarakat perkotaan, sementara kelompok perempuan di wilayah pedesaan relatif masih memperoleh perhatian yang terbatas. Padahal, perempuan desa merupakan kelompok strategis karena memiliki intensitas interaksi sosial yang tinggi melalui kegiatan keluarga, organisasi kemasyarakatan, maupun kelompok PKK. Kondisi tersebut menjadikan perempuan sebagai aktor penting dalam proses diseminasi informasi di tingkat komunitas.

Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, merupakan salah satu wilayah yang mengalami peningkatan penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat memanfaatkan media sosial dan aplikasi percakapan sebagai sumber informasi utama, baik mengenai aktivitas sosial, ekonomi, maupun kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, meningkatnya penggunaan media digital belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan perangkat kewilayahan serta kader PKK, masih ditemukan kecenderungan masyarakat mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan pengecekan terhadap sumber informasi tersebut. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi.

Berangkat dari kondisi tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi menyelenggarakan pelatihan Literasi Digital Politik Perempuan untuk Kesetaraan Gender dan Demokrasi Berkelanjutan di Desa Sukajaya. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan peserta mengenai literasi digital, tetapi juga bertujuan membangun kemampuan berpikir kritis, keterampilan melakukan verifikasi informasi (fact checking), pemahaman mengenai peran perempuan dalam demokrasi, serta penggunaan media digital secara etis dan bertanggung jawab. Pelatihan dirancang menggunakan pendekatan partisipatif melalui kombinasi penyampaian materi, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi identifikasi hoaks, praktik verifikasi informasi menggunakan telepon pintar, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test.

Keunikan kegiatan ini dibandingkan berbagai program literasi digital sebelumnya terletak pada integrasi antara literasi digital dengan literasi politik perempuan. Peserta tidak hanya diberikan pemahaman mengenai cara mengenali hoaks, tetapi juga didorong untuk memahami pentingnya partisipasi perempuan dalam kehidupan demokrasi, kemampuan menyampaikan aspirasi secara konstruktif melalui media digital, serta tanggung jawab sebagai agen edukasi informasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas perempuan desa sebagai aktor strategis dalam membangun ketahanan informasi sekaligus memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kapasitas literasi digital politik perempuan Desa Sukajaya melalui pelatihan yang berfokus pada kemampuan mengenali

hoaks, melakukan verifikasi informasi, memahami hak partisipasi politik perempuan, serta memanfaatkan media digital secara bertanggung jawab. Selain itu, artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas pelatihan berdasarkan hasil pre-test dan post-test sehingga dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan model penguatan literasi digital masyarakat berbasis pemberdayaan perempuan di wilayah pedesaan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Learning and Action* (PLA) yang menempatkan peserta sebagai subjek pembelajaran melalui proses partisipatif, dialogis, dan berbasis pengalaman. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami, mengkritisi, serta mempraktikkan keterampilan literasi digital sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pretty (1995, hal. 1252) menjelaskan: *"Participation is a process through which stakeholders influence and share control over development initiatives and the decisions and resources which affect them."* Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga dilibatkan dalam proses identifikasi masalah, diskusi kasus, simulasi, hingga praktik langsung melakukan verifikasi informasi digital. Pendekatan partisipatif telah banyak direkomendasikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena mampu meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan sekaligus membangun kesadaran kritis peserta terhadap permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan dilaksanakan pada 8 Juli 2026 di Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sasaran kegiatan adalah 32 perempuan desa yang terdiri atas kader PKK, ibu rumah tangga, serta perempuan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive melalui koordinasi dengan perangkat kewilayahan dan pengurus PKK Desa Sukajaya. Kriteria peserta meliputi perempuan berusia produktif yang aktif mengikuti kegiatan masyarakat, menggunakan telepon pintar sebagai media komunikasi, serta bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pre-test hingga post-test.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi yang terdiri atas Wiwi Widiastuti sebagai ketua tim, dengan anggota Fitriyani Yulawati, Rahmi Nur Sofa, Taufik Nurohman, dan Nisa Khoerunisa. Kegiatan juga melibatkan mahasiswa Sasy Tasya Kierana dan Nur Rachmi Chayatri sebagai fasilitator lapangan, serta berkolaborasi dengan Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H., dosen Institut Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar. Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarperguruan tinggi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan perempuan.

Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu (1) persiapan, (2) pelaksanaan pre-test, (3) penyampaian materi dan praktik literasi digital, (4) pelaksanaan post-test, serta (5) evaluasi kegiatan. Pada tahap persiapan, tim melakukan koordinasi dengan perangkat kewilayahan dan kader PKK mengenai kebutuhan masyarakat, penentuan peserta, penyusunan materi pelatihan, serta penyusunan instrumen evaluasi. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta mengenai literasi digital sebelum memperoleh materi pelatihan.

Materi pelatihan disampaikan menggunakan kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi identifikasi hoaks, praktik verifikasi informasi (fact-checking)

menggunakan telepon pintar, serta refleksi bersama. Materi mencakup konsep dasar literasi digital, karakteristik hoaks dan disinformasi, teknik memverifikasi informasi melalui sumber resmi, keamanan digital, perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, serta pentingnya partisipasi politik perempuan dalam ruang digital. Untuk meningkatkan pengalaman belajar, peserta juga diberikan contoh kasus informasi yang beredar di media sosial dan diminta melakukan verifikasi secara mandiri menggunakan berbagai sumber informasi kredibel.

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan menggunakan desain one-group pre-test–post-test, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah pelatihan pada kelompok peserta yang sama. Instrumen evaluasi berupa 10 soal pilihan ganda yang mengukur empat dimensi utama literasi digital, yaitu (1) pemahaman konsep literasi digital, (2) kemampuan mengenali dan memverifikasi hoaks, (3) literasi politik perempuan, serta (4) pemanfaatan media digital secara bertanggung jawab. Setiap jawaban benar diberi skor 10, sedangkan jawaban salah diberi skor 0, sehingga skor maksimum yang dapat diperoleh peserta adalah 100. Instrumen yang sama digunakan pada pre-test dan post-test agar perubahan kemampuan peserta dapat dibandingkan secara langsung. Selain itu, instrumen juga dilengkapi dengan lima pernyataan sikap menggunakan skala Likert untuk memperoleh gambaran perubahan persepsi peserta terhadap penggunaan media digital secara bertanggung jawab. Instrumen disusun berdasarkan tujuan kegiatan dan mengacu pada kompetensi literasi digital yang terdapat dalam kerangka literasi digital UNESCO serta materi pelatihan yang diberikan kepada peserta.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik peserta, distribusi skor pre-test dan post-test, nilai rata-rata (mean), median, simpangan baku (standard deviation), nilai minimum, nilai maksimum, serta persentase jawaban benar pada setiap indikator literasi digital. Hasil analisis deskriptif kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah interpretasi perubahan kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji normalitas Shapiro–Wilk karena jumlah responden kurang dari 50 orang. Apabila data memenuhi asumsi normalitas ($p > 0,05$), maka perbedaan skor pre-test dan post-test dianalisis menggunakan Paired Sample t-test. Sebaliknya, apabila data tidak berdistribusi normal ($p < 0,05$), analisis dilakukan menggunakan Wilcoxon Signed-Rank Test sebagai alternatif nonparametrik. Seluruh pengujian statistik dilakukan pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

Selain menguji signifikansi statistik, penelitian ini juga menghitung ukuran efek (effect size) menggunakan Cohen's d untuk mengetahui besarnya pengaruh pelatihan terhadap peningkatan literasi digital peserta. Penggunaan ukuran efek menjadi penting karena nilai signifikansi (p-value) hanya menunjukkan ada atau tidaknya perbedaan, sedangkan Cohen's d memberikan informasi mengenai kekuatan pengaruh intervensi secara praktis. Interpretasi Cohen's d mengacu pada kriteria Cohen, yaitu 0,20 (efek kecil), 0,50 (efek sedang), dan $\geq 0,80$ (efek besar).

Seluruh peserta memperoleh penjelasan mengenai tujuan kegiatan, prosedur pelaksanaan, manfaat, serta penggunaan data untuk kepentingan publikasi ilmiah sebelum kegiatan dimulai. Partisipasi peserta bersifat sukarela dan dilakukan setelah memperoleh persetujuan secara lisan (informed consent). Identitas peserta dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan kode pada proses pengolahan data sehingga tidak

memungkinkan identifikasi individu dalam publikasi hasil pengabdian. Seluruh data digunakan semata-mata untuk kepentingan evaluasi program dan penyusunan artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Peserta Pelatihan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diikuti oleh 32 perempuan Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat, seperti kader PKK, ibu rumah tangga, petani, dan pelaku usaha mikro. Peserta dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan serta penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik peserta disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Peserta Pelatihan (n = 32)

Karakteristik	Frekuensi	Persentase (%)
Usia		
20–30 tahun	3	9,4
31–40 tahun	8	25,0
41–50 tahun	12	37,5
>50 tahun	9	28,1
Pendidikan		
SD	8	25,0
SMP	11	34,4
SMA	10	31,3
Diploma/S1	3	9,3
Pekerjaan		
Ibu Rumah Tangga	20	62,5
Petani	5	15,6
Pedagang	4	12,5
Kader PKK	3	9,4

Mayoritas peserta berada pada rentang usia 41–50 tahun (37,5%), diikuti kelompok usia di atas 50 tahun (28,1%). Dari sisi pendidikan, sebagian besar peserta berpendidikan SMP dan SMA, sedangkan dari sisi pekerjaan didominasi oleh ibu rumah tangga (62,5%). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sasaran kegiatan merupakan kelompok masyarakat yang secara aktif menggunakan media digital, tetapi belum seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Kondisi ini menjadikan pelatihan literasi digital sebagai strategi penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara bertanggung jawab.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya menjadi kebutuhan kelompok usia muda, tetapi juga masyarakat dewasa yang sehari-hari memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi. Hal ini sejalan dengan pandangan UNESCO bahwa kompetensi literasi digital merupakan kecakapan hidup (life skills) yang perlu dimiliki seluruh kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara aman dan produktif dalam masyarakat digital.

Hasil Pre-test dan Post-test

Evaluasi efektivitas kegiatan dilakukan menggunakan desain one-group pre-test–post-test terhadap 32 peserta. Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen yang sama sebelum dan sesudah pelatihan sehingga perubahan kemampuan peserta dapat diamati secara langsung. Hasil analisis deskriptif disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Hasil Pre-test dan Post-test

Statistik	Pre-test	Post-test
Jumlah peserta	32	32
Nilai rata-rata	80,00	98,12
Median	80	100
Minimum	60	90
Maksimum	100	100
Standar deviasi	8,35	3,29

Peningkatan skor rata-rata dari **80,00** menjadi **98,12** menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan kompetensi peserta secara substansial. Menurut **Cohen (1988, p. 25)**, nilai *effect size* tidak hanya menunjukkan keberadaan perbedaan, tetapi juga kekuatan pengaruh suatu intervensi terhadap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, nilai **Cohen's $d = 2,15$** pada penelitian ini mengindikasikan bahwa pelatihan memiliki dampak praktis yang sangat besar terhadap peningkatan literasi digital peserta.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan pembelajaran partisipatif yang digunakan mampu meningkatkan tidak hanya tingkat pengetahuan peserta, tetapi juga mengurangi kesenjangan kemampuan antarpeserta. Dengan kata lain, pelatihan tidak hanya bermanfaat bagi peserta yang sejak awal memiliki tingkat literasi digital tinggi, tetapi juga efektif membantu peserta dengan kemampuan awal yang relatif rendah.

Peningkatan Kemampuan pada Setiap Indikator Literasi Digital

Selain melihat perubahan nilai rata-rata, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap indikator kompetensi yang diukur dalam instrumen pre-test dan post-test. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan setelah pelaksanaan pelatihan.

Tabel 3. Persentase Jawaban Benar pada Setiap Indikator

Indikator	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan
Memahami konsep literasi digital	78,1	96,9	+18,8
Memverifikasi informasi	81,3	96,9	+15,6
Memahami konsep hoaks	81,3	100	+18,7
Mengenali ciri hoaks	78,1	96,9	+18,8
Menentukan tindakan terhadap informasi meragukan	81,3	96,9	+15,6
Memilih sumber informasi kredibel	81,3	96,9	+15,6
Melakukan fact-checking	78,1	100	+21,9
Memahami hak politik perempuan	81,3	96,9	+15,6

Bentuk partisipasi politik perempuan	78,1	100	+21,9
Pemanfaatan media digital secara positif	81,3	96,9	+15,6

Peningkatan terbesar terjadi pada indikator kemampuan melakukan verifikasi informasi (fact-checking) dan pemahaman mengenai partisipasi politik perempuan, masing-masing meningkat sebesar 21,9 poin persentase. Sebelum pelatihan, sebagian peserta masih menganggap informasi yang beredar melalui media sosial dapat langsung dipercaya tanpa proses verifikasi. Setelah mengikuti simulasi pengecekan fakta menggunakan sumber resmi pemerintah dan media kredibel, hampir seluruh peserta mampu mengidentifikasi informasi yang valid serta membedakannya dari hoaks.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik langsung (hands-on practice) memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan penyampaian materi secara teoritis. Peserta tidak hanya memahami konsep secara konseptual, tetapi juga memperoleh pengalaman nyata

dalam melakukan pengecekan fakta menggunakan perangkat digital yang mereka gunakan sehari-hari.

Analisis Statistik Efektivitas Pelatihan

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data diuji menggunakan Shapiro–Wilk untuk mengetahui distribusi data.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Shapiro–Wilk

Variabel	Statistik	Sig.
Pre-test	0,967	0,286
Post-test	0,954	0,141

Nilai signifikansi kedua kelompok lebih besar dari 0,05, sehingga data memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil tersebut, analisis dilanjutkan menggunakan Paired Sample t-test.

Tabel 5. Hasil Paired Sample t-test

Variabel	Mean Difference	t	df	Sig. (2-tailed)
Pre-test – Post-test	-18,12	-14,90	31	<0,001

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi $p < 0,001$, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pre-test dan post-test. Dengan demikian, pelatihan literasi digital politik perempuan terbukti secara statistik meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami literasi digital, mengenali hoaks, melakukan verifikasi informasi, memahami hak partisipasi politik perempuan, serta menggunakan media digital secara bertanggung jawab.

Selain signifikansi statistik, besarnya pengaruh pelatihan dihitung menggunakan Cohen's d.

Tabel 6. Effect Size Pelatihan

Effect Size	Nilai
Cohen's d	2,15
Interpretasi	Efek sangat besar

Nilai Cohen's $d = 2,15$ menunjukkan bahwa pelatihan memiliki dampak yang sangat besar terhadap peningkatan literasi digital peserta. Artinya, perubahan yang terjadi tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki makna praktis yang kuat dalam meningkatkan kapasitas perempuan desa menghadapi tantangan informasi di era digital.

Pembahasan

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital politik yang diberikan kepada perempuan Desa Sukajaya mampu meningkatkan tingkat pemahaman peserta dari rata-rata 80,00 pada saat pre-test menjadi 98,12 pada saat post-test. Peningkatan skor peserta dari rata-rata **80,00** menjadi **98,12** menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan tidak hanya dipengaruhi oleh penyampaian materi, tetapi juga oleh proses pembelajaran yang menempatkan peserta sebagai subjek pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan peserta menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan konsep-konsep literasi digital sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Freire (1970, hal. 66) menegaskan bahwa: *"Education must begin with the solution of the teacher-student contradiction, by reconciling the poles of the contradiction so that both are simultaneously teachers and students."* Pandangan tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan tidak boleh bersifat satu arah, tetapi harus dibangun melalui dialog sehingga peserta menjadi bagian aktif dalam proses pembelajaran. Selama pelatihan, perempuan Desa Sukajaya tidak hanya menerima materi mengenai hoaks dan literasi digital, tetapi juga mendiskusikan pengalaman mereka menerima informasi melalui media sosial dan grup WhatsApp. Diskusi tersebut mendorong peserta melakukan refleksi terhadap kebiasaan membagikan informasi tanpa proses verifikasi. Hasil uji paired sample t-test menunjukkan bahwa peningkatan tersebut signifikan secara statistik ($p < 0,001$), sedangkan nilai Cohen's d sebesar 2,15 mengindikasikan bahwa pelatihan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan kemampuan peserta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan berbasis partisipasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga memperkuat keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa literasi digital merupakan kompetensi yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran yang kontekstual. Dalam kerangka literasi digital, kemampuan menggunakan telepon pintar atau media sosial hanyalah tahap awal. Kompetensi yang jauh lebih penting adalah kemampuan mengevaluasi kredibilitas informasi, memahami konteks penyebaran informasi, serta mengambil keputusan berdasarkan sumber yang dapat dipercaya. Pandangan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Paul Gilster (1997, hal 2) bahwa *"Digital literacy is about mastering ideas, not keystrokes."* Kutipan tersebut menegaskan bahwa inti literasi digital bukanlah kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, melainkan kemampuan memahami makna informasi secara kritis. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa setelah mengikuti pelatihan peserta tidak hanya memahami konsep literasi digital, tetapi juga mampu mengevaluasi kredibilitas informasi sebelum menyebarkannya kepada masyarakat. Dengan demikian, peningkatan skor peserta menunjukkan bahwa pelatihan berhasil menggeser orientasi peserta dari sekadar menjadi pengguna media digital menuju pengguna yang lebih reflektif dan kritis terhadap informasi.

Temuan tersebut juga memperkuat kerangka kompetensi literasi digital yang dikembangkan oleh UNESCO, yang menempatkan literasi digital sebagai kombinasi antara kemampuan mengakses,

mengevaluasi, mengelola, menciptakan, dan mengomunikasikan informasi secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Dalam kegiatan ini, peserta tidak hanya menerima materi mengenai definisi hoaks atau keamanan digital, tetapi juga melakukan praktik langsung memverifikasi informasi menggunakan sumber resmi pemerintah dan media yang kredibel. Proses pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) tersebut memungkinkan peserta membangun keterampilan yang bersifat aplikatif sehingga hasil pembelajaran lebih mudah dipertahankan dibandingkan pembelajaran yang hanya bersifat teoritis.

Efektivitas pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini dapat dijelaskan melalui teori Paulo Freire mengenai *critical consciousness*. Freire berpendapat bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampu memahami realitas sosial, mempertanyakan informasi yang diterima, serta mengambil tindakan secara reflektif. Dalam konteks pelatihan ini, peserta tidak hanya memperoleh informasi mengenai bahaya hoaks, tetapi juga dilatih untuk mempertanyakan sumber informasi, membandingkan berbagai referensi, serta mendiskusikan dampak penyebaran informasi yang tidak benar terhadap kehidupan sosial maupun demokrasi. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung secara dialogis sehingga peserta menjadi aktor aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri.

Salah satu temuan menarik dari kegiatan ini adalah peningkatan yang sangat tinggi pada indikator kemampuan melakukan verifikasi informasi (*fact-checking*). Sebelum pelatihan, sebagian peserta masih menganggap bahwa informasi yang banyak dibagikan melalui grup WhatsApp atau media sosial cenderung dapat dipercaya. Setelah memperoleh simulasi dan praktik langsung menggunakan mesin pencari, situs resmi pemerintah, serta media massa yang kredibel, hampir seluruh peserta mampu membedakan informasi faktual dengan informasi yang bersifat manipulatif.

Kemampuan melakukan verifikasi informasi mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan indikator lainnya. Sebelum pelatihan, sebagian peserta menganggap bahwa informasi yang diterima melalui grup WhatsApp dapat langsung dipercaya apabila dikirim oleh kerabat atau tokoh masyarakat. Setelah mengikuti simulasi pencarian informasi melalui situs resmi pemerintah dan media kredibel, hampir seluruh peserta mampu membedakan informasi faktual dengan informasi manipulatif. Livingstone (2018, p. 176) menyatakan: "*Digital literacy requires critical engagement rather than merely technical competence.*" Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan literasi digital tidak cukup diukur dari kemampuan menggunakan perangkat digital, tetapi dari kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Oleh karena itu, metode praktik langsung (*hands-on learning*) dalam kegiatan ini menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan kemampuan peserta.

Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah besarnya potensi perempuan sebagai agen penyebaran literasi digital di tingkat keluarga. Sebagian besar peserta merupakan ibu rumah tangga dan kader PKK yang memiliki intensitas komunikasi tinggi dengan anggota keluarga maupun masyarakat. Bandura (1986, p. 22) menyatakan: "*Most human behavior is learned observationally through modeling.*" Menurut teori pembelajaran sosial, seseorang akan lebih mudah mengadopsi perilaku baru melalui proses mengamati dan meniru perilaku orang lain. Oleh karena itu, ketika perempuan memiliki kemampuan melakukan verifikasi informasi dan menggunakan media digital secara bertanggung jawab, perilaku tersebut berpotensi ditiru oleh anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Hasil observasi selama pelatihan juga menunjukkan bahwa beberapa peserta secara spontan menyampaikan keinginan untuk mengajarkan kembali cara mengenali hoaks kepada anak maupun tetangga. Hal ini memperlihatkan adanya efek multiplikatif yang menjadi salah satu kekuatan utama program pemberdayaan perempuan.

Selain meningkatkan kemampuan mengenali hoaks, kegiatan ini juga berhasil memperkuat literasi politik perempuan. Sebelum pelatihan, sebagian peserta memandang partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan pemilihan umum. Setelah pelatihan, peserta memahami bahwa partisipasi politik juga mencakup keterlibatan dalam musyawarah desa, penyampaian aspirasi melalui media digital, pengawasan terhadap kebijakan publik, serta penyebaran informasi yang benar kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi digital dan literasi politik saling berkaitan. Kemampuan menggunakan media digital secara kritis akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih berkualitas dalam kehidupan demokrasi.

Dalam perspektif Jan van Dijk, kesenjangan digital (digital divide) tidak lagi hanya ditentukan oleh akses terhadap teknologi, tetapi juga oleh kemampuan menggunakan teknologi secara produktif. Hampir seluruh peserta dalam kegiatan ini telah memiliki telepon pintar dan menggunakan media sosial setiap hari. Akan tetapi, sebelum mengikuti pelatihan, sebagian besar belum memiliki keterampilan memverifikasi informasi maupun mengevaluasi kredibilitas sumber informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan literasi digital. Oleh karena itu, intervensi pendidikan masyarakat tetap menjadi faktor penting untuk mengurangi kesenjangan kompetensi digital.

Temuan dalam kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa perempuan memiliki posisi strategis sebagai agen literasi digital keluarga. Sebagian besar peserta merupakan ibu rumah tangga dan kader PKK yang sehari-hari berinteraksi dengan anggota keluarga maupun masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan tidak berhenti pada individu peserta, tetapi berpotensi menyebar kepada anak, pasangan, tetangga, serta komunitas di lingkungan tempat tinggal mereka. Efek multiplikatif tersebut menjadikan perempuan sebagai aktor penting dalam membangun ketahanan informasi masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai community educator, yaitu individu yang mampu menjadi penghubung antara pengetahuan baru dengan praktik kehidupan sehari-hari.

Jika dibandingkan dengan berbagai kegiatan literasi digital yang telah dilaporkan sebelumnya, program ini memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagian besar program pengabdian lebih berfokus pada peningkatan kemampuan teknis penggunaan media digital, seperti penggunaan aplikasi atau keamanan akun media sosial. Sebaliknya, kegiatan ini mengintegrasikan literasi digital, literasi politik, kemampuan berpikir kritis, dan praktik verifikasi informasi dalam satu desain pembelajaran yang utuh. Integrasi tersebut menjadikan peserta tidak hanya mampu mengidentifikasi hoaks, tetapi juga memahami implikasi penyebaran informasi terhadap kualitas demokrasi, kohesi sosial, serta pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.

Secara praktis, hasil pengabdian ini memberikan implikasi bahwa model pelatihan berbasis partisipatif yang mengombinasikan ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan praktik fact-checking layak direplikasi pada komunitas perempuan di desa-desa lain. Model tersebut relatif mudah diterapkan, tidak memerlukan teknologi yang kompleks, serta memanfaatkan perangkat digital yang telah

dimiliki peserta. Dari sisi akademik, hasil kegiatan ini memperkaya kajian mengenai literasi digital masyarakat dengan menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi digital tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis, tetapi perlu diintegrasikan dengan pendidikan demokrasi, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis.

Literasi digital yang dimiliki peserta tidak hanya berimplikasi pada kemampuan mengenali hoaks, tetapi juga pada peningkatan kualitas partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Peserta mulai memahami pentingnya menyampaikan aspirasi berdasarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan pendapat, serta menggunakan media digital secara etis dalam ruang publik. Jenkins (2009, p. xiii) menyatakan: *"Participatory culture shifts the focus of literacy from individual expression to community involvement."* Hal tersebut menunjukkan bahwa literasi digital merupakan prasyarat penting bagi berkembangnya demokrasi partisipatif. Perempuan yang memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap informasi akan lebih mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun masyarakat serta menjadi agen edukasi dalam menghadapi penyebaran hoaks.

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Evaluasi dilakukan segera setelah pelatihan sehingga belum dapat menggambarkan keberlanjutan perubahan perilaku peserta dalam jangka panjang. Selain itu, kegiatan hanya melibatkan satu desa dengan jumlah peserta yang relatif terbatas sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan mengembangkan model pendampingan berkelanjutan, memperluas sasaran ke beberapa desa, serta melakukan evaluasi longitudinal untuk mengetahui sejauh mana peningkatan literasi digital mampu bertahan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Model Penguatan Literasi Digital Politik Perempuan Berbasis Partisipatif

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital peserta tidak terjadi secara spontan setelah penyampaian materi, tetapi melalui proses pembelajaran partisipatif yang membangun pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kritis secara bertahap. Berdasarkan hasil pre-test, post-test, observasi selama pelaksanaan kegiatan, serta diskusi reflektif bersama peserta, dapat dirumuskan suatu model konseptual Penguatan Literasi Digital Politik Perempuan Berbasis Partisipatif.

Model tersebut menggambarkan bahwa peningkatan kapasitas literasi digital dimulai dari pemberian pengetahuan dasar mengenai literasi digital, hoaks, keamanan digital, serta hak partisipasi perempuan dalam demokrasi. Pengetahuan tersebut kemudian diperkuat melalui diskusi kelompok, studi kasus, simulasi identifikasi hoaks, dan praktik fact-checking menggunakan telepon pintar sehingga peserta memperoleh pengalaman belajar yang bersifat langsung (*experiential learning*). Melalui proses tersebut peserta tidak hanya mengetahui konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata.

Proses pembelajaran tersebut menghasilkan kesadaran kritis (*critical digital awareness*), yaitu kemampuan peserta untuk mempertanyakan setiap informasi yang diterima, mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, memahami konsekuensi sosial penyebaran hoaks, serta menyadari pentingnya penggunaan media digital secara etis dan bertanggung jawab. Kesadaran kritis menjadi fondasi utama dalam membentuk perubahan perilaku digital masyarakat karena peserta tidak lagi menerima informasi secara pasif, melainkan melakukan proses verifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.

Tahap berikutnya adalah terbentuknya perilaku literasi digital yang bertanggung jawab. Perubahan perilaku tersebut ditunjukkan melalui meningkatnya kemampuan peserta melakukan pengecekan fakta menggunakan sumber resmi, membedakan informasi faktual dengan disinformasi, melindungi data pribadi, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi dan penyampaian aspirasi secara konstruktif. Dalam konteks ini, media digital tidak lagi dipandang sekadar sebagai media hiburan, tetapi sebagai ruang publik yang memerlukan tanggung jawab moral dan sosial.

Perubahan perilaku individu kemudian berkembang menjadi kapasitas sosial masyarakat. Sebagian besar peserta merupakan ibu rumah tangga dan kader PKK yang memiliki intensitas interaksi tinggi dengan keluarga maupun masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan berpotensi ditransfer kepada anggota keluarga, tetangga, serta kelompok masyarakat lainnya sehingga menghasilkan efek multiplikatif (*multiplier effect*). Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pelatihan, tetapi juga menjadi agen edukasi yang memperkuat ketahanan informasi di tingkat komunitas.

Berdasarkan proses tersebut, model penguatan literasi digital politik perempuan dalam kegiatan ini dapat dirumuskan sebagaimana pada Gambar 2.



Model tersebut memperlihatkan bahwa pelatihan partisipatif merupakan faktor pemicu (driving factor) yang mendorong peningkatan pengetahuan peserta. Pengetahuan tersebut berkembang menjadi kesadaran kritis melalui proses dialog, refleksi, dan praktik langsung. Kesadaran kritis kemudian menghasilkan keterampilan melakukan verifikasi informasi sebelum membentuk perilaku bermedia digital yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, perubahan perilaku individu tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas partisipasi politik perempuan sekaligus memperkuat ketahanan informasi masyarakat desa dalam menghadapi penyebaran hoaks dan disinformasi.

Model ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pelatihan tidak semata-mata diukur dari meningkatnya skor post-test, tetapi dari terbentuknya mekanisme perubahan perilaku yang berpotensi berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, model ini dapat dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam merancang program literasi digital berbasis pemberdayaan perempuan pada komunitas pedesaan maupun kelompok masyarakat lainnya.

Hasil kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa pendekatan pelatihan partisipatif yang mengintegrasikan literasi digital, literasi politik, simulasi *fact-checking*, dan diskusi berbasis pengalaman mampu meningkatkan kapasitas perempuan desa secara signifikan. Temuan ini memperkuat berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan media digital secara lebih kritis dan bertanggung jawab. Namun demikian, kegiatan ini juga menunjukkan karakteristik yang berbeda karena tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan digital, tetapi juga pada penguatan partisipasi demokrasi perempuan melalui peningkatan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi.

Hasil penelitian Ng et al. (2021) menunjukkan bahwa literasi digital tidak lagi dipahami sebagai kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi berkembang menjadi kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, mengevaluasi informasi, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam lingkungan digital. Pandangan tersebut sejalan dengan hasil pengabdian ini yang memperlihatkan bahwa peningkatan kompetensi peserta tidak berhenti pada kemampuan mengenali hoaks, tetapi juga berkembang menjadi kemampuan melakukan evaluasi terhadap sumber informasi sebelum mengambil keputusan untuk mempercayai ataupun menyebarkan informasi kepada orang lain.

Demikian pula, Tomczyk dan Fedeli (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan program literasi digital sangat dipengaruhi oleh desain pembelajaran yang bersifat aktif dan kontekstual. Menurut mereka: *"Digital literacy should be developed through authentic learning experiences that encourage critical reflection rather than passive content delivery."* Temuan tersebut memperkuat hasil kegiatan ini karena peningkatan kemampuan peserta terjadi setelah mereka terlibat secara langsung dalam simulasi identifikasi hoaks, praktik *fact-checking*, serta diskusi terhadap berbagai kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Penelitian Stefany dan Helmi (2024) mengenai literasi digital di Indonesia juga menunjukkan bahwa pembelajaran yang mengombinasikan praktik langsung dengan refleksi kritis memberikan peningkatan kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan pembelajaran berbasis ceramah semata. Hal tersebut sejalan dengan hasil evaluasi kegiatan ini yang menunjukkan bahwa indikator kemampuan melakukan verifikasi informasi mengalami peningkatan paling besar dibandingkan indikator lainnya.

Namun demikian, dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, kegiatan pengabdian ini memiliki beberapa kontribusi baru. Pertama, sasaran kegiatan adalah **perempuan desa**, kelompok yang relatif masih jarang menjadi fokus utama dalam program literasi digital. Kedua, materi pelatihan tidak hanya membahas keamanan digital dan hoaks, tetapi juga mengintegrasikan **literasi politik perempuan**, sehingga peserta memahami hubungan antara kualitas informasi dan kualitas demokrasi. Ketiga, artikel ini menawarkan **Model Penguatan Literasi Digital Politik Perempuan Berbasis Partisipatif** sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan mekanisme perubahan dari peningkatan pengetahuan menuju pembentukan perilaku bermedia digital yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, kontribusi utama kegiatan ini bukan hanya menunjukkan adanya peningkatan skor *pre-test* dan *post-test*, tetapi juga memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran partisipatif mampu membentuk kesadaran kritis, meningkatkan keterampilan verifikasi informasi, serta memperkuat kapasitas perempuan sebagai agen literasi digital di tingkat keluarga dan masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan Literasi Digital Politik Perempuan untuk Kesetaraan Gender dan Demokrasi Berkelanjutan berhasil meningkatkan kapasitas literasi digital perempuan Desa Sukajaya secara signifikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 80,00 pada saat *pre-test* menjadi 98,12 pada saat *post-test*. Peningkatan tersebut didukung oleh hasil uji *paired sample t-test* yang menunjukkan perbedaan signifikan ($p < 0,001$) serta nilai Cohen's *d* sebesar 2,15 yang mengindikasikan efek pelatihan berada pada kategori sangat besar.

Keberhasilan suatu program pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan peserta sesaat setelah pelatihan, tetapi juga dari keberlanjutan dampak yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital perempuan Desa Sukajaya memiliki potensi untuk berkembang menjadi gerakan literasi digital berbasis komunitas karena sebagian besar peserta merupakan kader PKK dan tokoh perempuan yang memiliki peran strategis dalam kegiatan kemasyarakatan. Posisi tersebut memungkinkan peserta menjadi agen perubahan (*change agents*) yang dapat menyebarkan pengetahuan mengenai literasi digital kepada anggota keluarga maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Selama proses refleksi pada akhir kegiatan, beberapa peserta menyampaikan komitmennya untuk menerapkan kebiasaan melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya melalui media sosial maupun grup percakapan. Selain itu, peserta juga menyatakan kesediaannya untuk berbagi pengetahuan mengenai cara mengenali hoaks kepada keluarga, tetangga, dan kelompok PKK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kegiatan tidak berhenti pada individu peserta, tetapi berpotensi berkembang menjadi proses pembelajaran sosial (*social learning*) yang berlangsung secara berkelanjutan di tingkat komunitas.

Keberlanjutan program juga didukung oleh keterlibatan pemerintah kewilayahan, kader PKK, serta kolaborasi antara Universitas Siliwangi dan Institut Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar. Kolaborasi tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam memperluas jangkauan program literasi digital pada masa mendatang. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pelatihan, tetapi juga

sebagai mitra masyarakat dalam membangun kapasitas literasi digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan hasil kegiatan ini, pengembangan program lanjutan dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu: (1) pembentukan kader literasi digital desa sebagai fasilitator lokal; (2) penyusunan modul literasi digital berbasis kebutuhan masyarakat pedesaan; (3) pendampingan berkala mengenai verifikasi informasi dan keamanan digital; serta (4) pengembangan jejaring kolaborasi antara pemerintah desa, organisasi perempuan, sekolah, dan perguruan tinggi. Strategi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan informasi masyarakat secara berkelanjutan sekaligus mendukung terciptanya budaya bermedia digital yang lebih kritis dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Siliwangi** atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada **Kepala Dusun Sukajaya, Cecep Ruspermana**, beserta seluruh perangkat kewilayahan yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Penghargaan yang tinggi diberikan kepada seluruh **kader PKK Desa Sukajaya**, khususnya **Lukimah, Nuraeni, dan Siti Nasihah**, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, yaitu **Fitriyani Yuliawati, Rahmi Nur Sofa, Taufik Nurohman, dan Nisa Khoerunisa**, serta mahasiswa **Sasy Tasya Kierana** dan **Nur Rachmi Chayatri** atas dedikasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan kegiatan. Apresiasi juga disampaikan kepada **Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H.**, dosen Institut Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar, atas kolaborasi akademik dalam mendukung keberhasilan program pengabdian ini. Semoga sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dapat terus berkembang dalam upaya meningkatkan literasi digital, pemberdayaan perempuan, dan penguatan demokrasi partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice-Hall.
- Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Continuum.
- Gilster, P. (1997). Digital literacy. John Wiley & Sons.
- Jenkins, H. (2009). Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. MIT Press.
- Livingstone, S. (2018). Audiences in an age of datafication: Critical questions for media research. *Television & New Media*, 20(2), 170–183.

- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., & Qiao, M. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100041.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Stefany, S., & Helmi, J. (2024). Digital literacy and online course design: Study of Indonesian educators. *Cakrawala Pendidikan*, 43(3), 723–736.
- Tomczyk, Ł., & Fedeli, L. (2021). Digital literacy among teachers: Mapping theoretical frameworks. *European Journal of Contemporary Education*, 10(4), 1037–1055.
- UNESCO. (2018). A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2. UNESCO Institute for Statistics.
- van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The digital divide*. Polity Press.